

## PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

HIDAYAT<sup>1\*</sup>  
E1012151014

Sri Haryaningsih<sup>2</sup>Martinus<sup>2</sup>  
\*Email: [hidayat@student.ac.id](mailto:hidayat@student.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2009: 131) Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: Partisipatoris; Rule of law; Transparansi; Responsiveness; Konsensus; Persamaan hak; Efektifitas dan efisiensi; Akuntabilitas. Adapun Kesimpulannya penelitian yaitu. 1) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam membangun adalah memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. 2) Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak. Saran untuk kedepannya agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi (Osborne & Gaebler dalam Santosa, 2009: 68).

Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan.

Namun, apakah berkurangnya angka kemiskinan yang berarti meningkatnya angka kesejahteraan benar-benar sesuai dengan

keinginan masyarakat atau belum, sudahkah ketiga pilar bersinergi dan mempunyai peran yang seimbang, atau adakah data-data pencapaian tersebut hanya sebagai laporan bahwa berbagai perubahan yang terjadi telah mencapai hasilnya (entah hasil itu sesuai keinginan masyarakat).

Penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah peran pemerintah dan masyarakat sudah seimbang dalam pembangunan khususnya di perkotaan. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Pontianak selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan (fisik) di kota Pontianak sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih. Selain itu, di kota Pontianak juga terdapat Pasar Rakyat yang dikelola dengan baik sampai dengan sekarang. Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Pemuda dan

komunitas, suburnya lembaga sosial kemasyarakatan, adanya karnaval budaya, hingga masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotongroyongan warga

## 2. Identifikasi Masalah

- a. Peran masyarakat Pontianak Selatan dalam pembangunan belum jelas dan tidak terukur.
- b. Kerjasama Pemerintah dan masyarakat Pontianak selatan tidak optimal.
- c. Masih ada sebagian birokrasi di kota Pontianak yang menggunakan paradigma lama. Yaitu, masyarakat hanyalah objek pembangunan.

## 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Peran masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat”.

## 4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat“?

## 5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Peran masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak.

## 6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya tentang Peran masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.

- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di

dalam dan diluar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah.

Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas

pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak.

Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012: 104-118) dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

- 1) Sebagai penentu arah;
- 2) Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
- 3) Sebagai komunikator yang efektif;
- 4) Sebagai mediator; dan
- 5) Sebagai integrator

Senada dengan Arifin,

Robbins & Coulter (2009: 11-12)

*Hidayat E1012151014*

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan*

mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

- 1) Peran jembatan antar pribadi (Interpersonal Roles), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
- 2) Peran penyambung informasi (Informational Roles), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
- 3) Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (inisiator, enterprenuer), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004:

110-111) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif.

Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan.

Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai

aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Kaitannya dengan pembangunan, Tjokroamidjojo (1995:18) memandang bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk: yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai enterprenuer.

Sebagai keamanan dan ketertiban merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi keinginan, menjadi mediator antar berbagai kepentingan sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sebagai enterprenuer, pemerintah mendorong masyarakat untuk menemukan

berbagai inovasi, selain itu pemerintah disini berperan sebagai agen pembaharuan dalam pembangunan.

Sementara itu Siagian (2012: 142-150) menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitor, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri.

Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan kemanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.

Dalam bidang politik, pemerintah mempunyai peran untuk menjamin tidak adanya konflik yang berkepanjangan baik dari dalam maupun dari luar. Konflik dari dalam dapat berupa kekuatan oposisi yang mementingkan kelompok sendiri atas nama rakyat, dan konflik dari

luar dapat berupa pengaruh kuat dari negara lain untuk memantapkan hegemoninya. Di sinilah pemerintah bertanggung jawab untuk manajemen konflik dan menciptakan stabilitas dalam bidang tersebut.

Dalam menstabilkan kondisi ekonomi, peran pemerintah adalah mengupayakan kemungkinan terpeliharanya kondisi perekonomian dengan menstimulasi semangat kewirausahaan pada warganya, meningkatkan ketrampilan manajerial wirausaha, meningkatkan produktivitas (keterampilan operasional, etos kerja, kedisiplinan, kecermatan, loyalitas) tenaga kerja.

Jika kondisi ekonomi stabil, investor datang, lapangan usaha terbuka luas, jumlah pengangguran menurun, dan pembangunan berjalan dengan baik. Stabilitas sosial-budaya juga sangat penting dalam pembangunan. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk meminimalisir adanya gejolak sosial akibat adanya perubahan.

Sebagai inovator, peran pemerintah adalah harus mampu menjadi pelopor untuk menemukan metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru dalam pembangunan. Jika peran tersebut dimaksimalkan, maka pemerintah akan dapat menstimulasi dan mendorong masyarakatnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru sehingga pembangunan berjalan baik.

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya.

Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai

dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Publik senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan peradaban zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula akselerasi perkembangan ilmu administrasi akan seiring dengan

perkembangan paradigmanya. Secara konseptual, minimal dikenal lima paradigma administrasi publik di awal perkembangannya (Nicholas Henry dalam Miftah Thoha, 2008: 18-32) yang dimulai dengan dikotomi politik-administrasi, dilanjutkan dengan perkembangan prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dan saat ini administrasi publik sebagai administrasi publik yang berdiri sendiri sebagai salah satu bidang kajian ilmu administrasi.

Secara garis besar, alur perkembangan administrasi publik terbagi atas tiga domain paradigma yakni: old public administration, new public management/ reinventing government, new public service. Alur pemikiran klasik (old public administration) adalah perkembangan awal administrasi publik sebagai ilmu dengan tokoh pemikir utamanya Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard D. White. Ciri utama old public administration adalah cara pandang yang bersifat struktural-

formal dengan perhatian utama pada struktur organisasi, efisiensi, ekonomi, dan rasionalitas. Dalam menganalisis berbagai kegiatan pemerintahan, penekanan aliran ini terutama pada masalah personalia, administrasi keuangan, tata kerja perkantoran, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran birokrasi ideal Max Weber (Ibrahim, 2009:1).

Senada dengan Ibrahim, Miftah Thoha (2008: 73) mengemukakan ciri khas dari paradigma old public administration bahwa jasa pelayanan diberikan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, administrasi publik berkaitan dengan melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik, para administrator bertanggung jawab kepada pimpinan politik, kegiatan administrasi publik dilaksanakan melalui struktur hirarki organisasi dan dengan sistem kontrol, nilai-nilai efisiensi dan rasionalitas, serta keterlibatan warga amat terbatas.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya paradigma new public management/reinventing

government sebagai kritik dari paradigma sebelumnya bahwa birokrasi pemerintahan bersifat kaku, rumit, serta pelaksanaannya yang dinilai lamban. Paradigma ini muncul dengan semangat mentransformasikan kinerja pasar ke dalam birokrasi pemerintah, maka sering disebut sebagai paradigma privatisasi. Paradigma ini memandang bahwa seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dipahami sebagai hubungan produsen kepada pelanggannya. Dengan transformasi ini, para aparatur pemerintah ditekankan untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan (Santosa, 2009: 68).

Pemikir utama dari munculnya paradigma ini adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang memberikan penekanan bahwa konsep new public management/reinventing government pada hakikatnya merupakan upaya mengadopsi jiwa dan kinerja wiraswasta (entrepreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah.

Osborn & Gaebler mengemukakan sepuluh prinsip reinventing government yakni: pemerintah yang bersifat katalis (mengarahkan daripada mengayuh), pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani), pemerintah berorientasi misi (mengubah orientasi dari yang digerakkan peraturan menjadi digerakkan misi), menekankan persaingan terbaik dalam memberi pelayanan, membiayai hasil bukan birokrasi, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, menghasilkan daripada membelanjakan, mencegah daripada mengobati, desentralisasi, serta semangat wirausaha (Ibrahim, 2009: 81).

Perkembangan selanjutnya adalah paradigma new public service yang muncul sebagai perbaikan dari paradigma sebelumnya dengan menekankan berbagai elemen. Jika di paradigma old public administration kegiatan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dimonopoli pemerintah, sementara pada era paradigma new public

management lebih menekankan orientasi pasar dalam melayani masyarakat dengan menganggapnya sebagai pelanggan, maka dalam paradigma new public service semua elemen tersebut diupayakan untuk saling bersinergi. Ide dasar ini lahir dari teori citizenship democratic (kewarganegaraan demokratis), civil society, organisasi, serta postmodernisme administrasi publik (Miftah Thoha, 2008: 84).

Paradigma ini merupakan awal berkembangnya paradigma good governance dimana tiga pilar dalam suatu negara yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling bersinergi guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, dan efisiensi (Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa, 2009: 131). Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut:

a. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya);

b. Rule of law: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;

c. Transparansi: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang).

d. Responsiveness: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.

e. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah, menjadi konsensus;

f. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan;

g. Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif dan

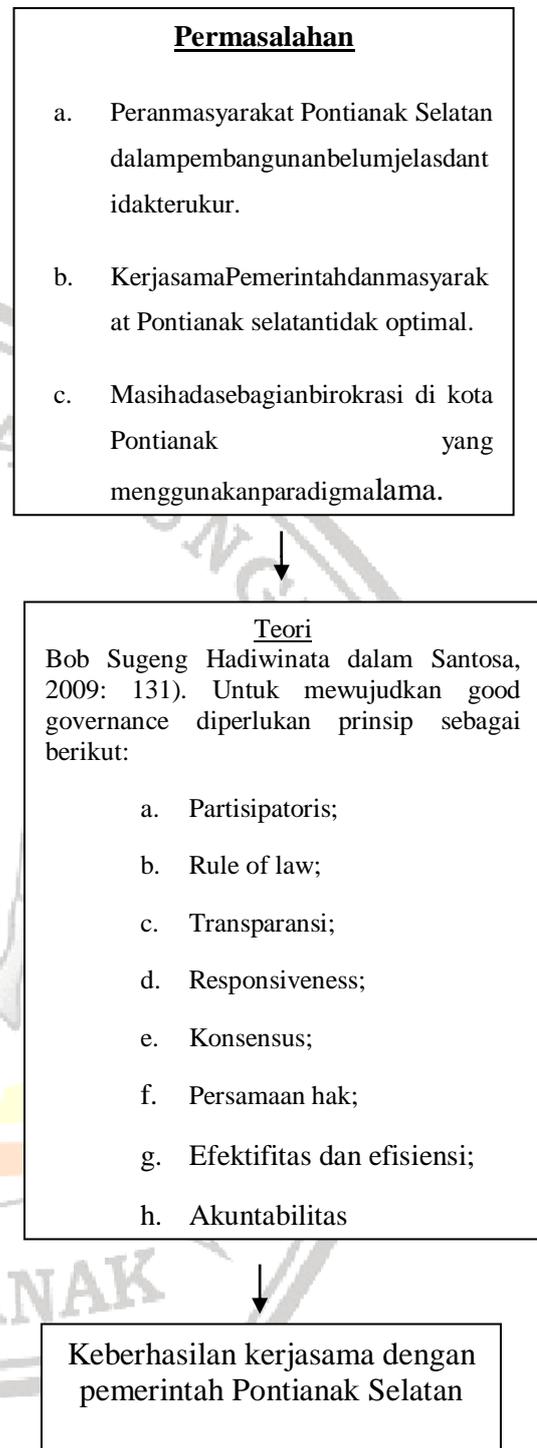
efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll;

- h. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.
- i. Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan.

## 2. Alur Pikir Penelitian

**Gambar 1**

### **Bagan Kerangka Pikir**



Sumber: Data Olahan Penulis

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejalas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Peran Pemerintah Dan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Pontianak

Dalam pembangunan, masyarakat kota Pontianak sudah cukup berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan. Peran masyarakat dapat terlihat sejak DPRD menyerap aspirasi mereka dimana masyarakat saling bertukar pikiran membahas berbagai permasalahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Firdaus Zarin wakil DPRD kota Pontianak berikut ini:

“Masyarakat sendiri proaktif lah kerjasama dengan pemerintah dan DPRD kota Pontianak. Alhamdulillah kita tetep berjalan, tetap aktif. Pokoknya ada apa-apa masyarakat sangat aktif. Termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dari penentuan hingga pelaksanaan masyarakat aktif. Dari awal itu masyarakat sudah rembug tentang permasalahan sekitar, di agenda serap aspirasi itu ya. Sampai pengawasan itu masyarakat juga ikut.”

Ditinjau dari kondisi infrastrukturnya, pembangunan kota Pontianak sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan hingga transportasi yang cukup memadai. Pembangunan di kota Pontianak lebih difokuskan pada program penanggulangan banjir seperti infrastruktur jalan yang antisipatif terhadap banjir, pembuatan saluran drainase serta penataan sampah. Selain itu, pembangunan juga dititikberatkan pada perbaikan sarana transportasi yakni program

pavingisasi dan penerangan jalan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edy selaku walikota Pontianak sebagai berikut:

“Kalau pembangunan secara umum disini ya bagus. Termasuk yang sudah beberapa tercapai itu yang pertama drainase, infrastruktur jalan. Jadi yang kita utamakan memang itu. Lalu kedua, sampah. Lalu pavingisasi. Lalu PJU-penerangan jalan umum, termasuk jalan-jalan gang itu sudah tercover.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Firdaus Zar'in. Beliau adalah wakil ketua DPRD yang juga sekaligus tokoh masyarakat kota Pontianak. Menurut Bapak Firdaus, pembangunan kota Pontianak sudah berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari berbagai pembangunan yang baru-baru ini berjalan dengan lancar diantaranya pavingisasi, penerangan jalan umum, hingga infrastruktur yang semakin bagus. Berikut kutipan wawancaranya:

“Betul mas, pembangunan disini hampir semuanya baik, ini juga dimulai dari walikota-walikota sebelumnya. Ini sudah sangat baik dan mohon dukungan dan bantuan dari pengawasan masyarakat aja, biar semakin baik”.

Sementara dari hasil wawancara dengan ibu Rusmini selaku lurah juga diketahui bahwa secara umum pembangunan di kota Pontianak sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Terlebih lagi pembangunan di Jalan-jalan utama. Menurut Ibu Rusmini, pembangunan di kelurahan yang dipimpinnya sangat berjalan dengan baik. Beliau mengungkapkan: “Alhamdulillah sampai sekarang berjalan maksimal karena untuk tahun 2021 ini saja banyak pembangunan di kota Pontianak khususnya di kelurahan saya meskipun sekarang lagi pandemi covid 19.”

Meski pembangunan secara fisik berjalan baik, namun pembangunan nonfisik juga tidak terlepas dari perhatian. Salah satu bentuk pembangunan nonfisik tersebut adalah pelestarian budaya yakni dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di taman-taman kota. Menurut bu Rusmini, kegiatan ditaman kota adalah upaya untuk melestarikan kebudayaan dan memanfaatkan taman kota secara positif.

Bapak Santoso selaku tokoh masyarakat kota Pontianak

memperkuat pernyataan bu Rusmini sebelumnya bahwa acara kebudayaan ditaman kota adalah positif. Selain itu, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat akan menyadari pentingnya menjaga kelestarian budaya. Berikut pernyataan Bapak Santoso selengkapnya:

“Saya sangat senang. Karena apa, itu masyarakat sendiri sudah menyadari bahwa tujuan kegiatan itu untuk melestarikan kebudayaan juga, saya sangat apresiasi dan senang atas kegiatan-kegiatan seperti ini.”

Meskipun secara umum pembangunan kota Pontianak berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu untuk ditangani. Diantaranya adalah masalah sampah. Masalah sampah menjadi penting karena ditahun lalu kota Pontianak tergenang banjir akibat sungai-sungai tersumbat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khusyairi berikut ini:

“...sampahnya itu masih dibuang sembarangan, kesadaran warga memang masih kurang. Nah ini kan jadinya itu nanti...apa itu, banjir. Lah karena itu harus ditindak tegas. Jika dibiarkan mereka ngelonjak.”

Berikut cuplikan wawancaranya lanjutannya:

“Jadi kita juga sebagai contoh, pemerintah harus memfasilitasi,. Nah itu untuk yang saya maksud penataan kesehatan itu, ya ini. Karena apa, karena kalo kita gak siap untuk tempat, untuk tungku pembakaran, dan pengolahan, ya percuma.”

Bapak Abdullah warga Pontianak tenggara memandang bahwa penataan sampah memang sudah mulai baik. Di lingkungan kecamatannya terdapat pengolahan sampah modern meskipun daya tampungnya masih terbatas. Bapak Abdullah yang ketika ditemui sedang duduk santai di teras rumahnya menuturkan:

“Iya mas, kalo di lingkungan saya ini ada pengolahan sampah modern. Kalo di depan itu bak sampah milik RT sana. Lah ini nanti ada yang mengambil sendiri, dibuang di sana, ada tungku pembakarannya. Lah untuk pengolaan itu kita ditarik iuran untuk membayari pekerja sampah itu mas. Jadi sampahnya terlihat bersih.”

Bapak Huda membenarkan bahwa tiap lingkungan sudah dikoordinir untuk pembuatan tong sampah. Nantinya ada pekerja pengambil sampah dari tong-tong sampah warga tersebut untuk dibuang di tempat

pembuangan sampah. Di sana nantinya sampah dipilah antara sampah basah dan kering. Sampah kering dibakar. Sampah yang masih bisa dijual lagi dikumpulkan. Sedangkan pekerja pengambil dan pembakar sampah dibayar oleh iuran warga yang dikoordinir kelurahan.

Berikut pernyataan Bapak Huda:

“Itu yang mengolah dari kelurahan. Bentuknya iuran misalnya dibayarkan warga saat pertemuan RT atau gimana gitu, lihat aturan RT-nya. Itu biayanya yang terkumpul ya buat honorinya pekerja itu. kelurahan yang koordinir. Jadi sekarang alhamdulillah sampah di kelurahan itu sudah mulai tertata.”

Terkait dengan pernyataan Bapak Khusyairi tentang penataan sampah, Bapak Huda memiliki pandangan dari sisi estetika. Beliau menyebutkan bahwa sampah tidak hanya untuk penanggulangan banjir dan penataan kesehatan. Namun beliau berpendapat bahwa sampah merusak keindahan lingkungan. Maka beliau berinisiatif untuk membuat pot-pot bunga di area bekas pembuangan sampah. Jadi, penataan sampah tidak hanya membuat tong-tong sampah maupun bak-bak sampah, melainkan juga rekondisi area bekas pembuangan

sampah liar. Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Huda berikut ini: “...Kita lihat kok masuk ke kota Pontianak kok disuguhkan tempat seperti itu kan kelihatannya kumuh, gak enak toh dilihat? Lah Akhirnya kita mempunyai gagasan, kita buat saja itu pot bunga di bekas tempat sampah. Sampe sekarang anda lihat seperti itu. Jadi ndak hanya sampahnya, tapi yang bekas tempat sampah pun harus diurus.”

Hal ini didasarkan pemikiran bahwa jika hanya pembakaran tidak akan proposional dengan jumlah sampah yang masuk. Terlebih jika musim penghujan kegiatan pembakaran akan mengalami kesulitan. Akibatnya sampah akan menumpuk. Berikut cuplikan wawancara dengan Bapak Jaka: “...orang-orang itu kalo menyelesaikan itu hanya sekedar progam, sekedar kegiatan, tapi problem-solvingnya masih belum benar-benar serius. Saya itu punya gagasan, kan sekarang itu ada tungku pembakaran, lah itu kalo kemarau, kalo musim hujan? Penduduk juga tambah banyak, ya kan? Nah menurut saya sampah itu gak hanya sekedar dibakar, tapi diolah. Jadi nanti hasil pembakaran itu misalnya bisa

dijadikan pupuk. Pemerintah kota Pontianak harus beli mesin pengolahan modern dan dibagikan kesetiap kelurahan yang ada dikota.”

Ditemui di tempat kerjanya, Bapak Mukhlis seorang pekerja pembakar sampah menyatakan bahwa masalah sampah ini memang menjadi hal yang cukup rumit. Beliau menyampaikan bahwa dahulu pengelolaan tempat pembuangan sampah tersebut sempat diserahkan pihak ketiga yakni salah satu perusahaan pengolahan sampah di kota Pontianak. Namun belakangan pengelolaannya justru tersendat dan membuat sampah menunggung karena tidak tertangani. Di bawah ini adalah penuturan Bapak Mukhlis yang disampaikan pada peneliti:

“Gimana ya mas. Dulu sampah itu sempat menunggung mas. kan memang dikelola, ndak cuma dibakar. Tapi sampe menunggung itu terus tidak dikelola. Lah sekarang ya seperti yang anda lihat.” Selain membahas berbagai permasalahan, masyarakat juga berperan dalam pembuatan proposal pembangunan. Setelah berbagai usulan diterima dan telah ditentukan bersama atas persetujuan Pemerintah kota Pontianak, maka masyarakat

membuat proposal pembangunan yang diajukan untuk menerima dana pelaksanaan pembangunan. Jadi masyarakat menjadi paham bagaimana merencanakan dan menggunakan anggaran dana pembangunan, karena yang merencanakan dan membuat proposal adalah masyarakat sendiri. Maka ketika anggaran dana mengalami kekurangan dalam pelaksanaannya, masyarakat sudah paham apa yang dilakukan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Pontianak**

### **1. Faktor Pendukung**

Salah satu faktor pendukung kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak adalah karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya. Selain itu peran Pemerintah kota juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik dengan masyarakat. Hal ini karena Pemerintah kota Pontianak mendorong masyarakatnya untuk

ikut serta berperan dalam pembangunan.

Dorongan dari Pemerintah kota Pontianak tidak hanya berupa ajakan maupun seruan-seruan. Pemerintah kota memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat pun ikut meniru dan akhirnya memahami posisinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Huda bahwa Pemerintah kota Pontianak memberikan teladan yang baik sehingga masyarakat pun dengan sukarela ikut berperan aktif dalam pembangunan. Bapak Huda menjelaskan:

“Kalo pemerintah proaktif, otomatis kesadaran warga juga mengikuti. Kadang-kadang kalo warga itu kurang kesadarannya itu kan kurang pendekatan. Kalo kita lakukan pendekatan, kita adakan pertemuan-pertemuan, maka otomatis warga itu bisa kok untuk kerjasama. selama ini Kan kadang-kadang antara pimpinan dan warga itu gak nyambung. Kalo pemerintah sering turun di lapangan, bakti sosial kita ikut, apapun kita ikut, otomatis kan

warga kan oh pimpinannya ikut terjun disitu kok masak kita gak, otomatis warga ikut lah.”

Dari penjelasan Bapak Huda diatas juga dapat diketahui bahwa selain memberikan teladan, Pemerintah kota Pontianak juga melakukan pendekatan pada masyarakatnya sehingga tidak ada jarak antara Pemerintah dengan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat nyaman dan dengan sukarela bekerjasama.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan biasanya muncul dalam tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Pihak yang tidak setuju ini nantinya menjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat. Sebagaimana yang dituturkan Bapak Khusyairi berikut:

“Jadi kadang-kadang kita ada hambatan dari pihak ketiga, itu Bapak RT kita panggil, kita adakan musyawarah, apa permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju, pro dan kontra disitu. Ini kalo dibiarkan jadi provokasi”.

Bapak Taslim juga tak menampik bahwa dalam pembangunan di wilayahnya ada penghambat berupa pihak-pihak yang tidak setuju dengan perencanaan yang telah disusun bersama. Menurut Bapak Taslim adanya pihak-pihak yang menjadi provokator seperti yang diungkapkan Bapak Khusyairi di atas adlah suatu kewajaran. Bapak Taslim mengungkapkan:

“Memang pasti ada saja yang begitu. Pasti ada lah pihak-pihak yang kurang setuju, pihak yang memprovokasi. Memang tidak semua lancar mas dalam pembangunan. Semua itu pasti ada tantangan, itu wajar toh mas. Lah wong dalam hidup saja penuh tantangan kok. Kalo gak ada tantangan kita gak akan maju mas”.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Dalam hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara

pemerintah-masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua pihak menyadari posisi dan perannya masing-masing serta mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.

2. Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak. Sedangkan faktor penghambat dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengintegrasikan semua pihak

untuk mengolah sampah. Selain itu, dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat masih cenderung dianggap sebagai bawahan untuk menerima arahan dan perintah melakukan pengawasan dari Pemerintah. Masyarakat masih belum cukup memahami arti penting pengawasan pembangunan.

### Saran

1. Diharapkan capaian yang telah dilakukan Pemerintah kota Pontianak dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan kota terus dipertahankan dan semakin dikembangkan. Apa yang telah dicapai Pemerintah kota bersama masyarakat kota Pontianak terutama dalam pengolahan sampah sebaiknya dijadikan wacana dan tindak lanjut terutama bagi Pemerintah provinsi Kalimantan Barat karena ini melibatkan kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Pontianak.
2. Diharapkan agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan

pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pengolahan sampah, diharapkan Pemerintah kota Pontianak lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih intens dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pengolahan sampah.

### F. Referensi

- Arifin, Syamsul. 2012. *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arnstein, 1996. *A Leader Of Citizen Partisipation Journal Of The Royal Town Planning Institute*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Arsiyah. Tanpa Tahun. *Modul Kuliah Otonomi Daerah*.
- Asy'ari, Sapari Imam. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Djopari dan Solihah, Ratna. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.